

**PELAKSANAAN LELANG TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA
YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR : 400/PID.B/2011/PN.PDG.
DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PADANG**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Magister Kenotariatan*



1. Dr. YUSLIM, S.H., M.H.
2. FRENADIN ADEGUSTARA, S.H., M.S.

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERISTAS ANDALAS
2018**

**PELAKSANAAN LELANG TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG
DIRAMPAS OLEH NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PADANG NOMOR : 400/PID.B/2011/PN.PDG. DI KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG**

(Ferdian, 1520123061, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 2018, 167 Halaman)

ABSTRAK

Perampasan alat bukti harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, azaz-azaz, dan prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh hukum, sebagai suatu bentuk dari sebuah Negara Hukum yang mempunyai badan-badan atau pelaksana dari peraturan hukum. Pada penulisan ini objek barang rampasan yang kemudian dilelang merupakan Objek Jaminan yang diikat dengan Fidusia. Rumusan masalahnya yaitu : 1) Apa hakekat hukum barang rampasan yang dapat dirampas oleh Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap?, 2) Bagaimana pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 400/PID.B/2011/PN.PDG di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang?, 3) Bagaimana kepastian hukum terhadap pemenang lelang objek jaminan fidusia dirampas untuk Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 400/PID.B/2011/PN.PDG yang pada kenyataannya menjadi jaminan di perusahaan lembaga keuangan non Bank (*Leasing*) PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang?. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian: 1) Hakekat hukum barang rampasan yang dapat dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus milik terdakwa dan benda yang dirampas harus mempunyai hubungan langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan., 2) Pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 400/PID.B/2011/PN.PDG di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang, Kejaksaan Negeri Padang selaku eksekutor pelaksana putusan hakim dan KPKNL selaku Institusi yang ditunjuk sebagai pelaksana lelang telah melaksanakan proses lelang yang telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, pelaksanaan lelang barang rampasan yang dilakukan memiliki mekanisme dan aturan tentang pelaksanaannya., 3) Kepastian hukum terhadap pembeli lelang objek jaminan fidusia dirampas untuk Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 400/PID.B/2011/PN.PDG yang pada kenyataannya menjadi jaminan di perusahaan lembaga keuangan non Bank (*Leasing*) PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang, masih belum dirasakan oleh pembeli lelang, terbukti adanya berbagai permasalan yang muncul setelah pembeli lelang dinyatakan sebagai pemenang lelang, dalam hal pengurusan dokumen kepemilikan sampai dengan keamanan dalam pemanfaatan kendaraan yang dibeli melalui proses lelang barang rampasan tersebut.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Lelang, Jaminan Fidusia, Barang Rampasan, Putusan Pengadilan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

**IMPLEMENTATION OF AUCTION ON OBJECT OF FIDUSIA
REMODELED BY COUNTRY UNDER THE COURT OF PADANG
NUMBER: 400 / PID.B / 2011 / PN.PDG. IN THE OFFICE OF STATE AND
STAIRNESS COUNTRY PADANG**

(Ferdian, 1520123061, Master Program of Notary, Faculty of Law, Andalas University, 2018, 167 pages)

ABSTRACT

The seizure of evidence must be carried out in accordance with the provisions of the law, principles, and the principles justified by law, as a form of a State of Law which has the bodies or implementers of the rule of law. At this writing the object of booty which then auctioned is a Guaranteed Object tied with Fiduciary. The formulation of the problem are: 1) What is the legal nature of the booty which can be seized by the State based on the decision of the court that has had permanent legal force?, 2) How the auction implementation of the fiduciary guarantee object which is seized by the State based on the decision of Padang District Court Number 400 / PID .B / 2011 / PN.PDG in the State Wealth Office and Auction Office Padang?, 3) How the legal certainty of the winner of the auction of fiduciary guarantee object is seized for the State based on the decision of Padang District Court No. 400 / PID.B / 2011 / PN.PDG which in fact becomes collateral in the company of non-bank financial institution (Leasing) PT. Adira Dinamika Multi Finance Padang Branch?. The research method used sociological juridical approach. Result of research: 1) The legal nature of the booty which may be seized by the state based on the decision of the court which has had permanent legal force shall be the property of the defendant and the seized possession shall have a direct relationship to the criminal act committed. 2) Implementation of the auction against the fiduciary guarantee object seized by the State based on the decision of Padang District Court Number: 400 / PID.B / 2011 / PN.PDG in the State Wealth Office and Auction Padang, Padang District Attorney as executor execution of judges and State Wealth Office and Auction Padang as the Institution appointed as the executor of auction has executed the auction process which has been in accordance with the procedures and rules applicable, the auction of the loot carried out has mechanisms and rules on its implementation, 3) Legal certainty to the auction buyer fiduciary guarantee object is seized for the State based on the decision of Padang District Court Number 400 / PID.B / 2011 / PN.PDG which is in full aannya become collateral in the company of non-bank financial institutions (Leasing) PT. Adira Dinamika Multi Finance Branch of Padang, still not felt by buyer of auction, proven existence of various problems which arise after buyer auction declared as winner of auction, in case of document management of ownership up to security in utilization of vehicle purchased through auction process of the spoils.

Keywords: Implementation, Auction, Fiduciary Guarantee, Confiscated Goods, Court Decision, State Wealth Service Office and Auction.